

Perketat Keamanan, Bakamla Gelar Operasi di Perairan Ambalat

AMBALAT (IM) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggelar Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut di Perairan Ambalat, yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, pada Minggu (13/2).

Operasi yang dilaksanakan unsur patroli KN Ular Laut-405 ini merupakan perintah gerak Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, nomor : OP.01.01/09/2022 dengan nama operasi "Gada Nusantara-III/22".

Operasi juga melibatkan unsur patroli lainnya secara bergantian seperti KN Bintang Laut-401, KN Singa Laut-402 dan KN Belut Laut-406.

Target operasi Gada Nusantara-III/22 yaitu melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut dan penegakan hukum sesuai prosedur serta memberikan bantuan SAR di perairan Ambalat.

Operasi Gada Nusantara-III/22 ini melaksanakan pendeteksian, pengenalan dan pengintaian terhadap

kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan pelanggaran di laut, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR).

Menurut Komandan KN Ular Laut-405 Letkol Bakamla Umar Dani, dengan operasi Gada Nusantara-III/22, diharapkan gangguan keamanan dan keselamatan laut Ambalat perbatasan Indonesia Malaysia dapat diminimalisir, baik gangguan berupa pelanggaran batas wilayah, pembajakan dan perompakan di laut, keselamatan pelayaran, penyelundupan, perusakan kabel dasar laut, pelanggaran terhadap peraturan perikanan (illegal fishing), pencemaran laut, perusakan terumbu karang dan biota laut, serta pendatang tanpa ijin (illegal migrant).

Saat melaksanakan patroli, KN Ular Laut-405 berjumpa dengan KRI Hasan Basri. Ini membuktikan bahwa simbol negara melalui TNI AL maupun Bakamla RI selalu hadir di daerah perairan perbatasan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut NKRI. ● mei

Panglima TNI dan KSAL Bahas Soal Pemindahan Koarmada 1

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono membahas soal rencana pemindahan Komando Armada I ke Wilayah Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau.

Saat ini kantor Koarmada 1 terletak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Dalam laporannya kepada Panglima TNI, Yudo menjelaskan proses yang saat ini dilakukan adalah melakukan survei lokasi untuk pembuatan Markas Komando (Mako) terlebih dulu.

"Melaporkan bahwa kami ada rencana pemindahan Koarmada 1 pak dengan adanya Koarmada RI ke Wilayah Tanjung Uban. Masih kami survei dulu di sana kira-kira untuk Mako," tutur Yudo dikutip dari laman YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu (13/2).

Dia memaparkan, salah satu alasan penting men-

gapa Koarmada 1 digeser ke wilayah barat adalah terkait situasi di Laut Cina Selatan (LCS) yang dianggap rawan. "Mungkin Armada RI jadi satu dengan Armada 1,2,3. Dengan adanya kerawanan di Laut Cina Selatan ini lebih bagus apabila kita geser ke barat," katanya.

Menanggapi itu, Panglima TNI mempersilahkan KSAL untuk melakukannya. "Monggo-monggo. Ini kan legalitasnya sudah ada. Dan waktu itu validasi ini dalam rangka mencari solusi yang nganggur-nganggur," jelas Andika.

Lebih lanjut dikatakan, bila pemindahan nanti masih terjadi kekurangan pada prosesnya, hal itu tidak akan menjadi masalah dan akan dibenahi di masa depan.

"Jadi bahwasanya sekarang dieksekusi masih ada kekurangan enggak apa, kita perbaiki pelan-pelan," tandasnya. ● han

FOTO: ANT



PENINGGALAN KESULTANAN TERNATE

Fanyira atau Kepala Pengelola Kedaton Kesultanan Ternate Rizal Efendi menunjukkan singgasana Sultan Ternate yang disebut Dodego Kolang di Kedaton Kesultanan Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sabtu (12/2). Singgasana yang terbuat dari kayu berusia ratusan tahun itu masih digunakan hingga kini oleh Sultan ke-49 Ternate Hidayatullah Sjah untuk menerima tamu-tamu penting, dan sekaligus sebagai tandu yang salah satunya digunakan oleh sultan untuk ritual penting saat bulan Ramadhan.

Gerindra Bantah Money Politics soal Admin Bagi-bagi Cokelat

JAKARTA (IM) - Viral admin media sosial Partai Gerindra bagi-bagi cokelat kepada netizen. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra membantah hal itu sebagai *money politics*.

"Itu kreativitas tim admin kami, yang memang kebanyakan anak-anak muda. Cokelat itu simbol persahabatan dan kehangatan. Maksud kami, supaya masyarakat tidak terus tegang dengan kondisi politik nasional," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhan kepada wartawan, Minggu (13/2).

Salah satu netizen membagikan foto bingkisan yang berisi cokelat itu. Dalam bingkisan itu juga disertakan catatan yang bertuliskan semoga bersemangat kepada penerima bingkisan. Pada kertas itu juga ada logo Partai Gerindra.

Ada beragam komentar

netizen, salah satunya menilai bagi-bagi cokelat itu sebagai *money politics*. Habiburokhan pun membantah anggapan itu.

"Yang sebut itu *money politics* harus belajar lagi UU Pemilu. Ini kan nggak terkait pemilu sama sekali. Yang terpenting, Partai Gerindra tetap performed kinerjanya," jelasnya.

"Di parlemen, kami tetap kritis membela rakyat, seperti kasus Wadas kemarin. Di eksekutif, menteri-menteri kami disebut berkinerja terbaik oleh berbagai lembaga survei," lanjutnya.

Habiburokhan juga berencana akan membagikan cokelat kepada warga di daerah pemilihannya di Jakarta Timur. "Saya juga mau ikutan bagi-bagi cokelat, ah, untuk warga Jakarta Timur. Selama ini hanya bagi-bagi kebutuhan bahan pokok," katanya. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANT



KUNJUNGAN KERJA MENTERI SOSIAL DI KEDIRI

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Pendopo Pemkab Kediri, Jawa Timur, Minggu (13/2). Kunjungan kerja Mensos tersebut guna memberikan bantuan ATENSI berupa bantuan kewirausahaan dan perlengkapan sekolah sekaligus nutrisi kepada sejumlah penerima manfaat dengan kriteria penyandang disabilitas, fakir miskin, dan korban kekerasan seksual.

Diduga Terlibat Aksi Terorisme Dua Pengurus MUI Diberhentikan

Dua pengurus MUI Kota Bengkulu telah menonaktifkan RH dari jabatan Wakil Ketua I yang membidangi Komisi Fatwa MUI Bengkulu dan CA sbagai Ketua Komisi Fatwa.

BENGKULU (IM) (MUI) Kota Bengkulu telah menonaktifkan dua pengurus-

nya, yaitu RH dan CA yang beberapa hari lalu ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Keduanya diduga terlibat aksi terorisme.

Ketua MUI Kota Bengkulu Yul Khamra menjelaskan, CA sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa, sedangkan RH menjabat sebagai Wakil Ketua I yang mem-

bidangi Komisi Fatwa MUI Bengkulu.

"Penonaktifan tersebut dilakukan mengingat keduanya telah ditetapkan tersangka oleh Mabes rhadam Polri beberapa waktu lalu," kata Khamra, Minggu (13/2).

Yul mengaku terkejut atas penangkapan terhadap edua anggota MUI tersebut, sebab keduanya merupakan anggota aktif di MUI sejak 2005 lalu.

Selama ini pihaknya tidak sedikit pun menaruh kecurigaan terhadap keduanya karena dalam keseharian mereka bergaul seperti biasa.

Bahkan RH pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal serta merupakan dosen bahasa Arab di salah satu universitas swasta di Provinsi Bengkulu.

"Kami tidak tahu latar belakang beliau, yang kami tahu beliau sebagai juru dakwah," ujarnya.

Sebelumnya, RH ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Polri bersama dua rekannya yaitu CA di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, dan M di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketiganya diketahui bergabung dalam kelompok jaringan teroris Jamaah Islami-

yah (JI) Bengkulu dan telah bersumpah bersumpah setia pada kelompok teroris JI sejak tahun 1999.

Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan sebelumnya membeberakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari ketiganya dalam jaringan teroris tersebut.

"Dari keterangan dan alat bukti yg didapat, mereka aktif dalam perekrutan, penggalangan dana dan memfasilitasi pelaku atau DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk sembunyi atau melarikan diri," kata Ramadhan menjelaskan, dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/2).

Ramadhan mengatakan, ketiga tersangka tersebut memiliki tugas pokok sebagai perwakilan cabang JI di wilayahnya. Ramadhan merinci peran utamanya sebagai Ketua Cabang dan perekrutan.

"Ketiga target operasi ini terlibat tindak pidana terorisme dimana CA terlibat sebagai Ketua JI Cabang Bengkulu yang tugasnya adalah merekrut, bersama M dan R, Tiga orang tersebut adalah jaringan JI Bengkulu yang terhubung dengan JI Palembang, Riau dan Sumatera Utara," ujarnya menambahkan. ● han

Didenda Ratusan Miliar Rupiah, Kemhan Gugat Putusan ICC Singapura ke PN Jakpus

JAKARTA (IM) - International Chambers of Commerce (ICC) Singapore menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia terkait soal sewa satelit.

Tidak terima atas putusan itu, Kemhan mengajukan perlawanan dengan menggugat putusan ICC Singapura itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Perlawanan itu tertuang dalam gugatan yang dilansir website PN Jakpus, Minggu (13/2). Gugatan itu mengantongi nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan tergugat Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD. Berikut permohonan Kemhan:

1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan.

2. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional - International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 Penetapan No:103/2015.eks jo. Putusan Arbitrase Internasional-Putusan Sela Final (Interim Final Award) tanggal 26 Maret 2014 dan Putusan Final (Final Award) tanggal 28 Mei 2014 Jo No 07/PDT/ARB-INT/2015/PN.JKT.PST tidak dapat dieksekusi batal demi hukum.

3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional - International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22

April 2021 Nomor 20472/HTG tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan.

4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Singkat cerita, Kemhan meneken kontrak dengan sejumlah vendor, yaitu Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran. Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia.

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai

dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar.

Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya," kata Mahfud pada 13 Januari 2021.

"Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang USD 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar)," imbuh Mahfud Md.

Di sisi lain, kasus ini sudah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sejumlah nama sudah dipanggil Kejagung, salah satunya mantan Menkominfo Rudiantara.

"Saksi yang diperiksa yaitu R selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014-2019, dan sebagai pemegang hak pengelolaan filling (HPF) slot orbit 123° Bujur Timur (BT), diperiksa terkait tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (11/2).

Leonard menyebut Rudiantara sekaligus pemegang hak pengelola filling (HPF) slot orbit 123° Bujur Timur (BT). ● han

FOTO: ANT



AKSI PENYELAMATAN HUTAN MENTAWAI

Mahasiswa asal Mentawai beratribut Sikerei (dukun Mentawai) membawa poster kampanye "Selamatkan Hutan Mentawai" di Pantai Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/2). Mahasiswa bersama Koalisi Penyelamatan Hutan Masa Depan Mentawai menggelar aksi kampanye untuk melindungi ruang hidup masyarakat Mentawai yang masih memanfaatkan alam dan hutan, sekaligus mendesak pihak terkait untuk menghentikan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di kabupaten itu.